

**INVENTARIS ARSIP
KONSTITUANTE
1956 – 1960**



Oleh:
Susni Heri Pamungkasing Dyah
Taupik Rachman
Sri Waluyanti

**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
1986**

DAFTAR ISI	I - III
PENDAHULUAN	IV - VII
BIBLIOGRAFI	VIII

I. BADAN.

A. UMUM

1. Peraturan tata tertib	1
2. Surat Keputusan	
a. Surat Keputusan Konstituante.....	1
b. Surat Keputusan Ketua Konstituante.....	1
3. Keanggotaan	1
4. Persidangan.	
a. Kunjungan.....	3
b. Pidato	3
c. Acara Sidang	3
d. Daftar Hadir	3
e. Rapat.....	3
f. Statistik Rapat	4
g. Dokumentasi	4

B. KHUSUS

1. Panitia Khusus	
a. Surat Keputusan	6
b. Daftar Hadir	6
2. Panitia Persiapan Konstitusi	
a. Surat Keputusan	6
b. Daftar Hadir	6
c. Laporan	6
d. Statistik Rapat	6
e. Komisi-komisi	
1) Keanggotaan.....	6
2) Daftar Hadir.....	7
3) Komisi I	
a) Azas dasar.....	7

b) Dasar negara	
1) Pancasila	7
2) Islam	8
c) Laporan	8
4. Komisi II	
a) Hak azazi manusia.....	8
b) Kewajiban warga negara	8
c) Laporan.....	8
5) Komisi III	
a) Bentuk negara	9
b) Pemerintahan	
1) Pemerintah	9
2) Pemerintah daerah	9
3) Pertahanan negara.....	10
c) Kepolisian	11
d) Peradilan	11
e) Perundang-undangan	11
f) Laporan.....	14
6) Komisi IV	
a) Wilayah negara.....	14
b) Bahasa.....	14
c) Bendera.....	14
d) Lagu Kebangsaan	14
e) Ibu Kota Negara	14
f) Perekonomian dan Keuangan	15
g) Laporan.....	16
f. Panitia Perumus	
1) Daftar hadir.....	16
2) Laporan.....	16
g. Panitia Istilah	16
5. Panitia Rumah Tangga	
a. Surat Keputusan	16
b. Daftar hadir	17
c. Rapat	17

d. Anggaran belanja.....	17
e. Laporan	17
6. Panitia Musyawarat	
a. Surat Keputusan	18
b. Statistik Rapat	18
II. SEKRETARIAT JENDERAL	
A. Ketatausahaan	18
B. Kerumahtanggaan	
1. Ketatausahaan	20
2. Gedung dan Perumahan.....	20
3. Kesejahteraan	20
C. Keuangan	
1. Ketatausahaan	21
2. Tunjangan dan Gaji	21
D. Kepegawaian	
1. Ketatausahaan	22
2. Formasi	24
3. Mutasi	24
E. Publikasi	25
F. Varia	26
Lampiran-lampiran	
- Indeks.....	30
- Daftar Singkatan.....	33
- Daftar pejabat dan anggota Konstituante.....	34
- Daftar arsip yang dimusnahkan.....	49
- Struktur organisasi.....	51

PENDAHULUAN

Badan Konstituante dibentuk pada tanggal 10 Nopember 1956. Konstituante timbul karena dilandasi oleh ketidaktepatan dari status Undang-undang Dasar 1945 yang ditetapkan dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada Aturan Tambahan Undang-undang Dasar 1945 yaitu ayat 2 dikatakan bahwa enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis bersidang untuk menetapkan Undang-undang Dasar. Jadi kami berkesimpulan bahwa Undang-undang Dasar 1945 hanya bersifat sementara. Majelis Permusyawaratan Rakyat diharapkan dapat menyusun dan menetapkan undang-undang dasar sebelum tanggal 17 Agustus 1946 seperti yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar 1945. Keinginan itu tidak dapat terwujud karena suasana politik saat itu tidak memungkinkan untuk melaksanakannya. Pada 27 Desember 1949 status negara kesatuan berubah menjadi Republik Indonesia Serikat.

Negara Republik Indonesia Serikat mempunyai undang-undang sendiri dimana rancangannya disusun selama Konferensi Meja Bundar, disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan seluruh anggota *Bijeenkomst voor Federal Overleg*. Konstitusi ini memberi kesempatan untuk membentuk negara unitarisme, maka pada tanggal 19 Mei 1950 tercapailah persetujuan untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai rancangan Konstitusi yang disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat di Yogyakarta, Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tanggal 15 Agustus 1950, dinyatakan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Konstitusi 1950 sebagai undang-undang dasarnya. Dalam Undang-undang Dasar 1950 pasal 134 tercantum: “Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) bersama-sama Pemerintah secepat-lekasnya menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia untuk menggantikan Undang-undang Sementara”.

Pendapat yang mendukung terbentuknya Konstituante antara lain:

- Sambutan Presiden Republik Indonesia tanggal 10 Nopember 1956 yaitu sebagai berikut:
“Kecepatan waktu pada tahun 1945 tidak memungkinkan kita untuk membuat Undang-undang Dasar yang sempurna sesempurnanya tetapi sekalipun demikian jiwa Undang-undang Dasar 1945 adalah sejiwa dengan cita-cita rakyat:
 - 1) “Pembentukan ketiga Undang-undang Dasar itu terjadi dalam waktu yang pendek, terges-gesa dan oleh suatu Badan yang beranggotakan paling banyak 200 orang dengan terlebih dahulu dibuat suatu rancangan oleh suatu panitia yang terdiri dari ahli-ahli”.

- 2) Organisasi Konstituante tersusun berdasarkan pasal 135 Undang-undang Dasar Sementara 1950 dengan bunyi sebagai berikut:
 1. Konstituante terdiri dari sejumlah anggota yang besarnya ditetapkan atas perhitungan setiap 150.000 jiwa penduduk yang mempunyai satu orang wakil di Konstituante.
 2. Anggota Konstituante dipilih oleh warga negara Indonesia dengan dasar umum dan cara yang bebas dan rahasia menurut aturan yang ditetapkan dalam undang-undang.
 3. Ketentuan-ketentuan dalam pasal 58 berlaku juga bagi Konstituante dengan pengertian bahwa jumlah wakil itu ada dua kali lipat.

Konstituante diberikan kebebasan penuh dalam mengatur organisasi.

Alat-alat kelengkapan Konstituante:

- Sidang Pleno Konstituante.
- Ketua dan Wakil Ketua Konstituante.
- Panitia Persiapan Konstitusi.
- Panitia Musyawarat.
- Panitia Rumah Tangga.
- Panitia lainnya: Panitia Perumus; Panitia Istilah.
- Sekretariat Konstituante.

Tugas dan kewajiban alat kelengkapan Konstituante:

1. Sidang Pleno: mengadakan sidang sebanyak-banyaknya dua kali dalam setahun. Selanjutnya bersidang apabila dipandang perlu oleh Panitia Persiapan Konstitusi atau atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya 1/10 anggota Sidang Konstituante.
2. Ketua dan Wakil Ketua:

Ketua: merancang dan mengatur serta memimpin pekerjaan Konstituante; menyimpulkan persoalan yang dikemukakan pembicara dan persoalan diputuskan oleh rapat; mengambil sumpah/janji anggota.

Wakil Ketua: menggantikan Ketua jika Ketua berhalangan hadir.
3. Panitia Persiapan Konstitusi:

Panitia ini dibantu oleh komisi-komisi. Tiap komisi mempunyai anggota sebanyak 7 orang, dimana anggota-anggota mewakili aliran yang ada. Komisi I membahas masalah dasar negara dan azas-azas dasar-dasar. Komisi II membahas masalah hak azasi manusia dan kewajiban warga negara. Komisi III membahas masalah pemerintahan, perundang-undangan, dan peradilan (1957); tahun 1958 masalah yang

dibahas berubah yaitu bentuk negara, kepolisian, dan pemerintah daerah. Komisi IV membahas masalah wilayah negara, bahasa, lagu kebangsaan, bendera, ibu kota negara, dan lambang negara (1957); tahun 1958 masalah yang dibahas berubah yaitu kepegawaian sipil dan militer, keuangan dan perekonomian.

4. Panitia Musyawarat : merancang acara dan waktu rapat pleno.
5. Panitia Rumah Tangga: melakukan pengawasan tertinggi atas segala sesuatu yang termasuk urusan rumah tangga Konstituante; mengangkat dan memberhentikan sementara serta memecat pegawai kecuali Sekretaris Jenderal dan sekretarisnya.
6. Panitia lain yang membantu dalam rapat yaitu Panitia Perumus: yang bertugas menyimpulkan pembicaraan yang diucapkan dalam rapat, merancang keputusan-keputusan rapat pleno. Panitia Istilah mencari istilah yang baru dan mengumpulkan istilah-istilah yang telah digunakan dalam rapat Panitia Persiapan Konstitusi.
7. Sekretariat Jenderal: mengurus segala sesuatu, serta memimpin pegawai serta membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam melakukan pekerjaan.

Konstituante telah berjalan hampir tiga tahun (1956-1959), tetapi hasil yang dicapai belum memuaskan juga. Tanggal 12 Maret 1959, Pemerintah memberikan keterangan mengenai keputusan Dewan Menteri di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian pada tanggal 22 April 1959, Presiden memberikan amanatnya di depan sidang Pleno Konstituante dan beliau menganjurkan agar kembali kepada Undang-undang Dasar 1945. Maka pada tanggal 29 April, 1 dan 2 Juni 1959 diadakan pemungutan suara di Konstituante dengan maksud apakah anjuran tersebut diterima atau tidak. Atas dasar itu maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang mengeluarkan dekrit.

Isi Dekrit Presiden:

1. Pembubaran Konstituante.
2. Berlakunya kembali ke Undang-undang Dasar 1945.
3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
4. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung.

Sejak dikeluarkannya dekrit, sejak tanggal 5 Juli 1959 Undang-undang Dasar berlaku kembali hingga kini.

Inventarisasi

Arsip-arsip Konstituante diserahkan ke Arsip Nasional pada tahun 1968 oleh Sekretariat Negara. Dalam penyerahan tersebut masih tercampur dengan arsip-arsip lain karena diterima dalam bentuk karungan.

Arsip-arsip itu dipisahkan oleh Pegawai Arsip Nasional kemudian dibuatkan daftar. Daftar tersebut tidak sesuai dengan isinya.

Jumlah arsip Konstituante kurang lebih 92 m dengan kurun waktu 1956-1959. Dalam koleksi tersebut terdapat arsip dalam kurun waktu 1960; arsip tersebut berisi masalah pemindahan pegawai Konstituante. Arsip-arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan kurang lebih 64 m; arsip-arsip ini sudah tidak memiliki nilai guna lagi.

Dalam pembuatan inventaris arsip Konstituante, kami mengatur dan menatanya menurut fungsi dan tugas dari Badan Konstituante dan Sekretariat Jenderal.

Badan Konstituante dibagi dua, yaitu umum dan khusus. Umum memuat peraturan tata tertib; surat-surat keputusan; keanggotaan dan persidangan. Khusus memuat Panitia Khusus; Panitia Persiapan Konstitusi yang dibantu oleh Komisi-komisi; Panitia Perumus dan Panitia Istilah; Panitia Rumah Tangga dan Panitia Musyawarat.

Sekretariat Jenderal berfungsi sebagai penunjang dari tugas badan yaitu memuat ketatausahaan; kerumahtanggaan; keuangan; dan kepegawaian.

BIBLIOGRAFI

1. Konstituante RI, Res Publica. Bandung : No. Peringatan.Th. 1-1958.
2. Muhamad Yamin, H.Mr.Prof. Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia 1982.
3. Simorangkir, J.C.T.Mr. SH. Et all., Aku Warga Negara Indonesia Jakarta: Gunung Agung. 1977.
4. Simorangkir J.C.T.Mr., Drs. Mang Reng Say. Konstitusi dan Konstituante Indonesia. Bandung: NV Soeroengan Jakarta. 1958.

INVENTARIS ARSIP KONSTITUANTE (1956 - 1960)

Nomor	Uraian Deskripsi Arsip	Volume	Tingkat Perkembangan	Kurun Waktu
1	Berkas mengenai peraturan tata tertib Konstituante.	1 bundel		1955-1958
2	Surat-surat Keputusan Konstituante tahun 1956-1959 disertai daftar.	1 sampul	asli, tembusan dan salinan	1956
3	Surat-surat Keputusan Konstituante tahun 1956-1959 disertai daftar.	1 sampul	asli, tembusan dan salinan	1957
4	Surat-surat Keputusan Konstituante tahun 1956-1959 disertai daftar.	1 sampul	asli, tembusan dan salinan	1958
5	Surat-surat Keputusan Konstituante tahun 1956-1959 disertai daftar.	1 sampul	asli, tembusan dan salinan	1959
6	Surat-surat Keputusan Ketua Konstituante disertai daftar.	1 sampul	asli dan tembusan	1905/05/10
7	Surat-surat keputusan ketua konstituante disertai daftar, asli, dan tembusan	1 sampul		1905/05/11
8	surat surat keputusan ketua konstituante disertai daftar, asli, dan tembusan	1 sampul		1905/05/12
9	undang undang no. 23 mengenai keadilan dan acara pidana khusus anggota konstituante stentilon	2 eksemplar		1956/11/29-1957/01/18
10	daftar daftar riwayat hidup anggota konstituante	3 eksemplar		1956-1959
11	berkas mengenai mereka yang diterima menjadi anggota konstituante	1 sampul		1956-1959
12	daftar nama nama anggota konstituante	6 eksemplar		1956-1957
13	kartu kartu anggota konstituante	1 sampul		1905/05/09
14	kartu kartu anggota konstituante	1 sampul		1905/05/12
15	sidang pleno I, II, III	1 bundel		1905/05/10
16	sidang pleno I, II, III dan sidang I	1 bundel		1958-1959
17	sidang panitia persiapan konstitusi dan sidang I,II,III dan sidang I	1 bundel		1957-1958-1959
18	buku kegiatan harian anggota konstituante	1 eksemplar		1957/01/02
19	berkas mengenai mereka yang diberhentikan dengan hormat dari instansi karena menjadi anggota konstituante	1 sampul		1956-1959
20	berkas mengenai anggota konstituante yang merangkap menjadi dewan perwakilan rakyat	1 sampul		1956-1957
21	berkas mengenai penggantian anggota konstituante	1 bundel		1957-1959
22	berkas mengenai anggota yang berhenti antara waktu	1 bundel		1957-1959
23	berkas mengenai anggota yang konstituante yang mengundurkan diri	1 bundel		1957-1959
24	berkas mengenai alamat anggota konstituante	1 bundel		1957-1959
25	berkas mengenai anggota konstituante yang ditahan	1 sampul		1957-1959
26	berkas mengenai fraksi fraksi dalam konstituante	1 sampul		1956-1959
27	berkas mengenai anggota konstituante yang menggabungkan diri dalam fraksi fraksi	1 sampul		1905/05/11
28	bekas mengenai pensiun anggota konstituante	1 sampul		1957-1959
29	intruksi penguasa perang pusat, anggota konstituante/DPR/ Dewan pengurus partai politik/organisasi massa mengenai surat ijin akan meninggalkan Indonesia.		Stensilan	1959/05/11
30	Berkas mengenai kunjungan anggota konstituante ke daerah daerah	1 sampul		1956-57
31	Berkas mengenai kunjungan anggota konstituante ke luar negeri	1 sampul		1957-1959
32	Pidato pidato dari anggota konstituante. Konsep	1 sampul	asli, stensila, dan salinan	1957-1959
33	Pidato pidato dari pejabat negara: Juanda, dan Moh. Hatta	4 lembar	asli dan stensilan	1957/07/16-10/31, 1958/12
34	Pidato radio	1 sampul	asli, salinan, dan stensilan	1957-1959
35	berkas mengenai sidang acara konstituante	1 bundel		1957-1959
36	daftar daftar hadir sidang pleno	1 bundel		1956/11, 1957/01-02
37	daftar datar hadir sidang pleno	1 bundel		1957/05-06, 11
38	daftar daftar hadir sidang pleno	1 bundel		1958/01-02, 07-08
39	daftar daftar hadir sidang pleno	1 bundel		1958/09
40	daftar daftar hadir sidang pleno	1 bundel		1959/05/08
41	berkas sidang pleno	1 bundel		1905/05/12
42	guntingan koran mengenai rapat rapat konstituante	1 bundel		1956-1959
43	statistik rapat rapat konstituante	1 bundel		1956-1959
44	buku kumpulan peraturan sekitar konstituante dan anggota	2 eksemplar		1958-1959
45	berkas mengenai risalah resmi dan risalah sementara	1 bundel		1905/05/10
46	berkas mengenai risalah resmi dan risalah sementara	1 bundel		1905/05/11
47	berkas mengenai risalah resmi dan risalah sementara	1 bundel		1905/05/12
48	majalah res publica no. Peringatan tahun 1	2 eksemplar		1958/12
49	siaran kilat konstituante no. 1-12 tahun I dan dan no. 13 tahun II. stensilan	1 sampul		1958/01/12-08/12
50	Ikhtisar bulanan konstituante no.1-2 tahun II dan no. 1-12 tahun III dan no. 1, 2, 4 tahun IV mengenai kesimpulan harapan masyarakat sekitar penyusunan undang-undang dasar 1945.	1 sampul	Stensilan	1957/ 10-12, 1958/01-12, 1959/01-05
51	ichtisar singkat dari ceramah kepala kepolisian negara, R. Said soekanto tjokhrohadiatmodjo.	1 lembar	Tembusan	1958/05/30
52	ichtisar singkat mengenai materi azas dasar dalam sidang pleno II tahun 1958.	1 lembar	Tembusan	1958/09/30
53	ichtisar singkat mengenai sistim pemerintahan, lagu kebangsaan, bendera negara, dan hak azazi.	1 sampul	Asli dan tembusan	1958-1959
54	ichtisar singkat kegiatan anggota konstituante dalam sidang.	1 sampul	Tembusan, salinan, dan stensilan	1958-1959
55	ichtisar keputusan keputusan sidang konstituante	2 eksemplar		1958-1959
56	kronik mingguan konstituante no. 1-4 tahun I.	1 eksemplar	Tembusan dan stensilan	1956/12/31
57	kronik mingguan konstituante no. 1-17 tahun II.	2 eksemplar	Tembusan dan stensilan	1957/02/14-05/14, 06/24-09/29
58	kronik mingguan konstituante no. 1-4 tahun II dan kornik intern. Stensilan	1 sampul		1957/09/19-21, 11/ 4-21, 1958/04
59	kronik mingguan konstituante no. 1-4 tahun I dan no. 1-6 tahun II.	3 eksemplar	Tembusan dan stensilan	1957/01/01-02/17, 05/13-06/23, 10/01-12/09
60	kronik mingguan konstituante no. 1-9 tahun I dan no. 1-3 tahun III.	2 eksemplar	Tembusan dan stensilan	1958/01/17-06/29, 09/15-12/31
61	kronik mingguan konstituante no. 1-11 tahun ii.	1 sampul	Tembusan dan stentilan	1958/01/13-09/14
62	kronik kingguan konstituante no. 1-7 tahun II.	1 eksamplar	Tembuasn dan stensilan	1959/01/05-03/17
63	kronik mingguan konstituante No. 1-6 tahun III.	1 eksamplar	Tembusan dan stensilan	1959/03/23-06/04
64	" angka berbicara" dari R. Soelamulhadi , anggota konstituante	1 lembar		1959/06/14
65	surat surat keputusan kepanitian khusus	1 sampul	daftar	1905/05/09

66	daftar daftar hadir panitia khusus	1 sampul		1956-1957
67	surat surat keputusan panitia persiapan konstitusi	1 sampul	daftar, asli, tembusan, dan salinan	1905/05/10
68	surat surat keputusan panitia persiapan konstitusi	1 sampul	daftar, asli, tembusan, dan salinan	1905/05/11
69	surat surat keputusan panitia persiapan konstitusi	1 sampul	daftar, asli, tembusan, dan salinan	1905/05/12
70	daftar daftar hadir panitia persiapan konstitusi	1 bundel		1905/05/10
71	daftar daftar hadir panitia persiapan konstitusi	1 bundel		1905/05/11
72	daftar daftar hadir panitia persiapan konstitusi	1 bundel		1905/05/12
73	laporan laporan panitian persiapan konstitusi.	1 sampul	Asli dan tembusan	1957-1959
74	statistik rapat rapat panitia persiapan konstitusi.	1 sampul	Asli dan tembusan	1957-1958
75	daftar nama nama komisi I-IV	1 sampul		1957-1959
76	berkas mengenai perubahan anggota komisi komisi	1 sampul		1957-1959
77	daftar daftar hadir komisi tahun I	1 sampul		1957-1959
78	daftar daftar hadir komisi tahun II	1 sampul		1957-1959
79	daftar daftar hadir komisi tahun III dan IV	1 sampul		1957-1959
80	surat surat pernyataan mengenai azas dasar.	1 sampul	Konsep, asli, tembusan, dan stensilan	1958-1959
81	surat dari angkatan muda islam indonesia mengenai DN Aidit yang mengingkari pancasila	1 lembar		1957/10/10
82	surat dari R.A.D winoto mengenai arti pancasila.	1 sampul	Asli,tembusan, dan salinan	1905/05/10
83	surat surat mengenai dukungan pancasila sebagai dasar negara.	1 bundel	Asli dan tembusan	1957/01.11-12
84	surat surat mengenai dukungan pancasila sebagai dasar negara.	1 bundel	Asli dan tembusan	1958/01.04,07,10,11,12
85	surat surat mengenai dukungan pancasila sebagai dasar negara.	1 bundel	Asli dan tembusan	1959/01/06
86	kartu pos kartu pos mengenai dukungan pancasila sebagai dasar	1 pak		1905/05/10
87	kartu pos kartu pos mengenai dukungan pancasila sebagai dasar	1 pak		1905/05/11
88	kartu pos kartu pos mengenai dukungan pancasila sebagai dasar	1 pak		1959/01
89	kartu pos kartu pos mengenai dukungan pancasila sebagai dasar	1 pak		1959/02
90	kartu pos kartu pos mengenai dukungan pancasila sebagai dasar	1 pak		1959/03
91	kartu pos kartu pos mengenai dukungan pancasila sebagai dasar	1 pak		1959/04/06
92	guntingan koran mengenai pancasila	1 sampul		1957-1959
93	surat surat pernyataan mengenai dukungan islam sebagai dasar	1 bundel	Asli dan tembusan	1957-1959
94	kartu pos mengenai dukungan islam sebagai dasar negara	1 pak		1957-1959
95	laporan laporan komisi 1 mengenai dasar negara.	1 sampul	Asli, tembusan, dan stensilan	1957-1959
96	surat- surat pernyataan mengenai usul hak hak azazi manusia dicantumkan dalam undang undang dasar.	1 bundel	Asli, tembusan dan salinan	1957-1959
97	kartu pos kartu pos mengenai dukungan usul hak hak azazi manusia dicantumkan dalam undang undang dasar.	1 pak		1905/05/12
98	guntingan koran mengenai pendidikan dan kebudayaan	1 pak		1902/08/16
99	laporan-laporan komisi II mengenai hak-hak azazi manusia dan kewajiban warga negara. Asli, salinan, dan stensilan.	1 sampul		1957-1959
100	berkas mengenai pernyataan agar pemerintah mempertahankan negara kesatuan dan federal	1 sampul		1957-1959
101	berkas mengenai pembentukan kabinet baru	1 sampul		1955-1959
102	berkas mengenai pernyataan agar pemilihan umum dilaksanakan secara adil dan demokratis	1 sampul		1956-1958
103	surat menyurat antara SOBSI kebumen dengan konstituante mengenai kerja sama dwi tunggal soekarno hatta. Tindakan dan stensilan.	2 lembar		1957/12/ 25,1958/04/27
104	berkas amanat presiden soekarno pada saat penyerahan presiden Mr. Sartono	1 sampul		1905/05/11
105	kartu pos kartu pos mengenai dukungan pemerintah koalisi nasional.	1 pak		1955/07/08
106	guntingan koran mengenai partai partai di indonesia	1 sampul		1957-1958
107	guntingan koran mengenai pemerintahan	1 sampul		1905/05/11
108	berkas pernyataan mengenai usul agar daerah otonom dicantumkan dalam undang -undang dasar	1 bundel		1956-1959
109	guntingan koran mengenai daerah otonom	1 sampul		1905/05/12
110	undang-undang no. 29 tahun 1954 mengenai pertahanan negara.	1 lembar	Stensilan	1959/02/02
111	berkas pernyataan mengenai usul menormalisasikan keadaan	1 sampul		1957-1959
112	surat -surat pernyataan menentang dan menghentikan bom A dan H.	1 sampul	Asli, tembusan, dan stensilan	1905/05/10
113	guntingan koran mengenai keadaan politik	1 bundel		1957-1959
114	guntingan koran mengenai normalisasi keadaan	1 bundel		1957-1959
115	guntingan koran mengenai pertahan negara	1 sampul		1905/05/11
116	surat-surat pernyataan mengenai tuntutan agar DI/TII di berantas.	1 sampul	Asli dan tembusan	1905/05/09
117	berkas pernyataan protes atas dibebaskanny schimidt, algojo DI/TII.	1 sampul		1959/04/05
118	surat-surat pernyataan agar dewan banteng dibasmi.	1 sampul	Asli dan stensilan	1905/05/09
119	berkas pernyataan agar memberantas pemberontak PRRI	1 sampul		1957-1959
120	surat-surat pernyataan mengenai usul agar A.L Pope di hukum mati.	1 sampul	Asli, tembusan, dan stensilan	1957/06,12
121	guntingan koran mengenai PRRI di sumatera barat	1 sampul		1905/05/11
122	guntingan koran mengenai peristiwa di sumatera tengah	1 sampul		1905/05/11
123	surat-surat mengenai dukungan proklamasi dua maret.	1 sampul	Asli dan stensilan	1957-1959
124	surat-surat pernyataan mengenai peristiwa cikini raya.	1 sampul	Asli, tembusan, dan stensilan.	1957-1959
125	guntingan koran mengenai peristiwa cikini raya	1 sampul		1957-1959
126	surat dari perguruan nasional medan mengenai pertimbangan jawatan kepolisian RI agar dikembalikan dalam susunan kementerian dalam	1 lembar		1956/10/20
127	naskah mengenai kepolisian dalam undang undang dasar. Stensilan	2 lembar		1959/01/20
128	guntingan koran mengenai peradilan	1 sampul		1905/05/10
129	berkas mengenai pernyataan usul agar diadakan undang-undang perkawinan.	1 sampul		1956-1959
130	resolusi dari kongres nasional IPKI mengenai usul agar dibicarakan dan disyahkan undang-undang milisi dan undang-undang wajib bela umum.	1 lembar	Stensilan	1905/05/02
131	resolusi-resolusi mengenai undang-undang pendidikan dan kebudayaan	1 sampul	Asli, tembusan, dan stensilan	1957-1958
132	surat-surat dari pemuda gerakan pembela pancasila dasar negara republik indonesia jawa barat mengenai penentuan piagam jakarta	2 lembar		1957/01/12,1959/05/30
133	berkas mengenai usul amandemen perubahan rumusan undang-undang dasar	1 sampul		1957-1959
134	berkas mengenai rumusan pasal-pasal dalam undang-undang dasar dasar tentang dasar negara	1 sampul		1957-1959
135	surat-surat pernyataan mengenai undang-undang dasar negara republik indonesia	1 sampul		1957-1958
136	undang-undang dari beberapa negara.	1 sampul	Asli, tembusan, dan salinan	1957-1959
137	surat dari solichin salam mengenai usul agar jabatan presiden/wakil harus ditempati oleh WNI dan beragama islam	1 lembar		1957/11/27

138	surat-surat pernyataan agar dikeluarkan undang-undang agraris.	2 lembar	Stensilan	1957/10/21, 1958/09/01
139	surat-surat mengenai rencana pencabutan modal asing diganti dengan undang-undang agraria	1 sampul		1958-1959
140	daftar penunjuk proses terjadinya badan legeslatif dalam undang-undang dasar.	1 sampul	Asli dan tembusan	1958/02-1959/01
141	daftar penunjuk proses terjadinya badan yudikatif dalam undang-undang dasar negara.	1 sampul	Asli dan tembusan	1958/02/02- 1959/02/11
142	berkas mengenai rumusan badan eksekutif dalam undang-undang dasar	1 sampul		1958/02/20-10/27
143	surat-surat pernyataan mengenai dukungan undang-undang keadaan bahaya menghadapi pemberontak.	1 sampul	Asli dan tembusan	1958/11/12
144	surat-surat agar kepentingan pemuda dimasukkan dalam undang-undang dasar.	2 lembar	Konsep, asli, dan tembusan	1958/11/20, 1959/06/26
145	telegram-telegram mengenai dukungan kembali ke undang-undang dasar 1945.	1 sampul		1957/02-05, 1959/02- 09
146	surat-surat pernyataan mengenai dukungan kembali ke undang-undang dasar 1945	1 bundel		1959/01/03
147	surat-surat pernyataan mengenai dukungan kembali ke undang-undang dasar 1945	1 bundel		1959/03
148	surat-surat pernyataan mengenai dukungan kembali ke undang-undang dasar 1945	1 bundel		1959/05/06
149	surat-surat pernyataan mengenai dukungan kembali ke undang-undang dasar 1945	1 bundel		1959/07/09
150	kartu pos kartu pos mengenai dukungan kembali ke undang-undang dasar 1945	1 pak		1957-1958
151	kartu pos kartu pos mengenai dukungan kembali ke undang-undang dasar 1945	1 pak		1959/02/05
152	guntingan koran mengenai undang-undang perkawinan	1 sampul		1957-1959
153	guntingan koran mengenai perundang-undangan	1 sampul		1905/05/11
154	guntingan koran mengenai piagam bandung	1 sampul		1905/05/11
155	laporan-laporan komisi lili mengenai bentuk negara dan sistim pemerintahan.	1 sampul	Asli, tembusan, dan stensilan	1958-1959
156	berkas mengenai rumusan wirayan negara dalam undang-undang dasar	1 sampul		1957/06/12
157	berkas pernyataan mengenai pembebasan irian barat.	1 sampul		1957-1959
158	guntingan koran mengenai pembebasan irian barat	1 sampul		1957-1959
159	berkas mengenai rumusan bahasa dalam undang-undang dasar	1 sampul		1957-1958
160	surat-surat pernyataan mengenai dukungan bahasa daerah mempunyai kedudukan resmi dalam daerahnya dan pemakaiannya diatur dalam undang-undang.	1 sampul	Asli dan tembusan	1957-1958
161	berkas mengenai rumusan serta tata tertib bendera negara dalam undang-undang dasar	1 sampul		1957-1959
162	berkas mengenai rumusan lagu kebangsaan dalam undang-undang dasar	1 sampul		1957/07-1958/09
163	daftar petunjuk mengenai proses terjadinya rumusan ibu kota negara dalam undang-undang dasar.	1 sampul	Asli dan tembusan	1957/07-1958/09
164	surat-surat pernyataan mengenai usul letak ibu kota negara republik indonesia.	1 sampul	Asli dan tembusan	1957-1958
165	surat-surat pernyataan mengenai penurunan narga kebutuhan senan- basan	1 sampul		1956-1959
166	berkas mengenai pernyataan agar perusahaan-perusahaan dan tanah partikelir milik belanda diambil aihl oleh pemerintah	1 sampul		1957-1959
167	surat permintaan agar menindak pengacau di bidang ekonomi	1 lembar		1958/09/29
168	berkas pernyataan mengenai usul agar alat produksi dimiliki negara dan alat pertanian dimiliki petani	1 sampul		1958/05-07, 1959/01
169	surat-surat pernyataan mengenai hak mogok dan perburuhan.	1 sampul		1956-1959
170	kartu pos kartu pos mengenai pernyataan hak mogok dan perburuhan	1 pak		1905/05/12
171	kartu pos kartu pos pernyataan mengenai usul agar sistim ekonomi tidak sistim kapitalis	5 lembar		1959/03/19
172	kartu pos kartu pos mengenai usul pembangunan ekonomi nasional menuju masyarakat adil dan makmur	1 pak		1959/01
173	guntingan koran mengenai ekonomi	1 sampul		1905/05/10
174	guntingan koran mengenai keuangan dan ekspor	1 sampul		1957-1958
175	laporan-laporan komisi IV mengenai keuangan, kepengawasan, dan perekonomian.	1 sampul	Salinan dan stensilan	1957-1958
176	daftar-daftar hadir panitia pemurus azas-azas dasar	1 sampul		1957/08-1958/09
177	daftar-daftar hadir panitia perumus hak-hak manusia	1 sampul		1958/01/08
178	daftar-daftar hadir panitia perumus bahasa	1 sampul		1958/01
179	daftar-daftar hadir panitia perumus bentuk pemerintahan	1 sampul		1958/01
180	laporan-laporan panitia perumus.	1 sampul	Tembusan, salinan, dan stensilan	1957-1958
181	berkas panitia istilah	1 sampul		1957-1959
182	lembaran mengenai penggunaan istilah dalam rapat panitia persiapan konstitusi	1 lembar		1905/05/10
183	daftar-daftar hadir panitia istilah	1 sampul		1957-1959
184	surat-surat keputusan panitia rumah tangga	1 sampul	daftar, tembusan, dan stensilan	1905/05/10
185	surat-surat keputusan panitia rumah tangga	1 sampul	daftar, tembusan, dan stensilan	1905/05/11
186	surat-surat keputusan panitia rumah tangga	1 sampul	daftar, tembusan, dan stensilan	1905/05/12
187	daftar-daftar hadir panitia rumah tangga	1 bundel		1957/03/12
188	daftar-daftar hadir panitia rumah tangga	1 bundel		1958/02/11
189	daftar-daftar hadir panitia rumah tangga	1 bundel		1959/01/07
190	surat-surat mengenai soal-soal yang akan diajukan pada rapat panitia rumah tangga konstituante.	2 lembar	Konsep	1905/05/11
191	surat dari nahdatul ulama mengenai keuangan konstituante	1 lembar		1958/08/29
192	berkas mengenai cara pemilihan ketua dan wakil konstituante	1 sampul		1956-57,59
193	berkas mengenai calon-calon sekretaris jenderal konstituante	1 sampul		1957/06/07
194	laporan sub panitia urusan keuangan pada sidang pleno	1 lembar		1958/10/28
195	rapat-rapat panitia rumah tangga.	1 sampul	Stensilan	1957-1959
196	berkas mengenai anggaran belanja	1 bundel		1956-1958
197	berkas mengenai anggaran belanja	1 bundel		1959-1960
198	laporan-laporan panitia rumah tangga.	1 sampul	Tembusan, salinan, dan stensilan	1957-1959
199	surat-surat keputusan panita masyarakat di sertai daftar.	1 sampul	Asli dan tembusan	1905/05/10
200	surat-surat keputusan panitia masyarakat di sertai daftar. A	1 sampul	sli dan tembusan	1905/05/11
201	surat-surat keputusan panita masyarakat di sertai daftar.	1 sampul	Asli dan tembusan	1905/05/12
202	statistik rapat-rapat panitia masyarakat	1 eksemplar		1957-1958

203	Surat Edaran Sekretaris Jenderal Konstituante No. 4423/ Konst/2958 mengenai jalannya pekerjaan dalam Sekretariat Konstituante.	5 lembar	Tembusan dan stensilan	1958/03
204	Surat Edaran biro I mengenai tugas Biro I disertai skema.	2 lembar	Tembusan	1957/06/13
205	Surat dari Sekretariat Konstituante kepada Kepala Pos mengenai perubahan alamat Sekretariat Konstituante.	2 lembar	Konsep dan tembusan	1956/10/20
206	petunjuk dan pedoman kerja redaksi/ notulen sekretariat konstituante.	2 lembar	Konsep	1905/05/10
207	surat-surat mengenai hubungan kedudukan pemerintah dengan konstituante.	3 lembar	Tembusan	1957/10/10-19-23
208	catatan keputusan-keputusan pada pertemuan antara kepala urusan dan seksi-seksi di lingkungan biru I.	2 lembar	Tembusan	1957/10/15
209	surat-surat mengenai ketentuan penggunaan cap sekretaris jenderal konstituante.	3 lembar	Asli dan tembusan	1957/11/23
210	surat kepada kementerian penerangan mengenai susunan organisasi sekretariat konstituante.	2 lembar	Tembusan	1957/12/30
211	laporan dari seksi kartotik kepada kepala biro I mengenai hasil kerja seksi kartotik.	1 lembar	Asli dan tembusan	1905/05/10
212	laporan-laporan hasil kerja seksi kronik.	1 sampul	Tembusan	1958=1959
213	surat-surat mengenai pembentukan perwakilan sekretariat konstituante di jakarta.	1 sampul	Konsep, asli, dan tembusan	1958/08-09, 1959/01
214	surat-surat mengenai pekerjaan dan penyelesaian urusan dokumentasi.	1 sampul	Tembusan	1905/05/12
215	daftar surat-surat masuk dan keluar sekretariat konstituante.	1 bundel	Asli dan tembusan	1957-1958
216	daftar surat-surat masuk dan keluar sekretariat konstituante.	1 bundel	Asli dan tembusan	1905/05/12
217	buku-buku kontrol	2 eksemplar		1956-1957
218	buku-buku agenda surat- surat masuk dan keluar sekretariat konstituante berdasarkan unit kerja yang ada dalam konstituante	5 eksemplar		1957-1958
219	buku-buku agenda surat- surat masuk dan keluar sekretariat konstituante berdasarkan unit kerja yang ada dalam konstituante	5 eksemplar		1905/05/12
220	buku-buku agenda surat- surat masuk dan keluar sekretariat konstituante	5 eksemplar		1957/07/12
221	buku-buku agenda surat- surat masuk dan keluar sekretariat konstituante	5 eksemplar		1958/01/06
222	buku-buku agenda surat- surat masuk dan keluar sekretariat konstituante	5 eksemplar		1958/06/12
223	buku-buku agenda surat- surat masuk dan keluar sekretariat konstituante	5 eksemplar		1959/01/06
224	buku keputusan panitia rumah tangga.	3 eksemplar		1957-1958
225	klapper partai-partai/organisasi, badan dan gerakan-gerakan massa.	6 eksemplar		1956-1959
226	klapper nama-nama tamu konstituante.	3 eksemplar		1958-1960
227	naskah acara timbang terima pimpinan urusan umum dengan pimpinan rumah tangga serta pertanggungjawabannya	1 lembar		958/06/14
228	denah rencana perubahan ruang sidang pleno dan gedung konstituante (gedung merdeka)	1 sampul		1905/05/09
229	Surat mengenai penggunaan gedung bekas konstituante digunakan sebagai gedung konfrensi internasional atau dewan perancang	3 lembar	Konsep, asli, dan tembusan.	1959/07/26, 10/10
230	berkas rumah ketua konstituante di jalan ciliki no. 47	1 sampul		1957-1959
231	berkas rumah jalan jawa no. 4,8, dan jalan ciliwung no.17	1 sampul		1957-1959
232	berkas rumah jalan tasikmalaya no.1 dan jalan surapati no. 33	1 sampul		1905/05/10
233	berkas mengenai yayasan kesejahteraan pegawai konstituante.	1 sampul		1957-1959
234	berkas petunjuk dan pedoman bagi bendaharawan	1 sampul		1950/03/25, 1958/06
235	surat dari kabinet perdana menteri kepada kepala urusan keuangan dalam masa likuidasi mengenai mensentralisir kas pembantu ke kas besar	1 lembar		1959/09/02
236	lembaran negara mengenai tunjangan yang bersifat pensiun bekas ketua dan anggota DPR RI.	1 lembar	Stensilan	1953/05/04
237	lembaran negara no.62 tahun 1957 mengenai pencabutan undang-undang darurat no.3 tahun 1956 (lembaran negara no.50 tahun 1956) dan penetapan undang-undang darurat penetapan keuangan ketua, wakil, dan anggota konstituante.	1 lembar	Stensilan	1957/05/07
238	peraturan presiden dan penjelasan no. 1 tahun 1960 mengenai pemberian uang jasa kepada ketua, wakil, dan anggota konstituante.	2 lembar	Salinan	1960/01/20
239	surat keputusan presiden mengenai tunjangan wilopo di sertai surat pengantar.	2 lembar	Salinan dari salinan	1953/12/28
240	intruksi ketua konstituante mengenai keuangan anggaran panitia rumah tangga	1 lembar		1957/11/16
241	kutipan dari surat menteri keuangan mengenai ketentuan pengeluaran yang dibebankan pada mata anggaran negara untuk pensiun dilakukan dengan mata uang rupiah.	2 lembar	Stensilan	1959/03/26
242	berkas kedudukan keuangan ketua, wakil, dan anggota konstituante.	1 sampul		1953,1954,1956-1959
243	surat-surat mengenai usul pemberian tunjangan keahlian akoop goelangge.	2 lembar	Tembusan	1905/05/10
244	buku mengenai aturan kepegawaian	1 eksemplar		1905/05/05
245	berkas susunan pegawai	1 bundel		1956-1959
246	berkas pegawai yang diperbantukan pada pada sekretariat konstituante	1 sampul		1956-1959
247	klapper nama-nama pegawai	5 eksemplar		1956-1959
248	data kepegawaian	1 eksemplar		1905/05/10
249	kartu-kartu pegawai alfabet a-k	1 bundel		1957-1959
250	kartu-kartu pegawai alfabet k-s	1 bundel		1957-1959
251	kartu-kartu pegawai alfabet s- w	1 bundel		1957-1959
252	daftar-daftar nama pegawai	1 sampul		1957-1960
253	laporan mengenai kepegawaian.	1 eksemplar	Tembusan	1957/05/06
254	Kutipan dari Surat keputusan Ketua Konstituante mengenai pembebasan tugas bendaharawan Soerojo dan menunjuk Usep Ranawidjaja sebagai bendaharawan sementara	1 lembar		1957/07/31
255	berita timbang terima antara soerojo kepada usep ranawidjaja.	2 lembar	Tembusan	1957/07/31, 09/03
256	kutipan dari Surat keputusan Ketua Konstituante mengenai pembebasan tugas bendaharawan Usep Ranawidjaja menunjuk olly suratmadja sebagai bendaharawan dan Moh. Soeleman sebagai pembantu bendaharawan sementara.	1 lembar		1957/07/31
257	buku mengenai surat keputusan	1 eksemplar		1958-1959
258	buku mengenai daftar riwayat hidup pegawai	2 eksemplar		1958-1959
259	berita timbang terima antara bendaharawan dengan kepala urusan keuangan disertai lampiran.	1 sampul	Tembusan	1958/01/02
260	Surat dail Ketua Konstituante kepada Kepala Urusan/Seksi Sekretariat Jenderal Konstituante mengenai pergeseran dan pemindahan pegawai dilakukan setelah ada persetujuan dari Sekretariat Jenderal.	1 lembar	Stensilan	1958/01/16
261	surat dari serikat pekerja konstituante mengenai keadaan pegawai. Stensilan	1 lembar		1958/07/30

262	surat dari sekretariat jenderal konstituante kepada dewan urusan pegawai mengenai nasib pegawai setelah konstituante dibubarkan	1 sampul		1958-1960
263	berkas mengenai penyaluran dan penampungan pegawai setelah konstituante dibubarkan	1 sampul		1958-1960
264	buku register mengenai masalah pegawai	1 eksemplar		1905/05/12
265	daftar-daftar pegawai berdasarkan golongan	1 sampul		1905/05/12
266	buku mengenai pegawai konstituante	1 eksemplar		1905/05/12
267	surat dari jenderal konstituante mengenai penyusutan pegawai karena akan berakhirnya tugas konstituante disertai daftar nama pegawai.	2 lembar	Tembusan dan stensilan	1959/06/20
268	pengumuman konstituante mengenai aktifitas pegawai dalam masa pembubaran konstituante.	1 lembar	Konsep, stensilan	1959/06/15
269	berkas mengenai sekretariat konstituante	1 sampul		1957-1959
270	daftar-daftar susunan tenaga untuk sidang pleno saksi depemas.	2 lembar	Asli dan stensilan	1959/11/28, 12/05
271	rekapitulasi formasi sekretariat konstituante yang diusulkan.	2 lembar	asli dan tindasan	1956/05/02
272	rencana formasi dan sub bagian gedung, halaman, dan perlengkapan.	1 lembar	Tindasan	1956/12/11
273	laporan-laporan panitia kecil I mengenai penetapan formasi sekretariat konstituante.	3 lembar	Stensilan	1957/03/07, 07/26
274	susunan formasi pegawai sekretariat konstituante.	1 sampul	Asli dan stensilan	1957-1958
275	skema susunan formasi dan pembagian urusan pegawai.	1 lembar	Konsep dan asli	1958/02/04
276	agenda mutasi pegawai	1 eksemplar		1905/05/09
277	berkas Drs. Usep rinawidjaja.	1 sampul		1956-1959
278	berkas Drs. Kabullah Widjajamarsa	1 sampul		1957-1958
279	Berkas R. Agoes Soerja Koesoemadinata	1 sampul		1957-1958
280	surat dari sekretariat jenderal mengenai penyerahan pimpinan sekretariat akoop goelange kepada Drs. Usep rinawidjaja.	2 lembar	Konsep dan stensila	1957/07/19
281	berkas dudy singadilaga	1 sampul		1957-1958
282	berkas olly suriatmadja	1 sampul		1958-1959
283	surat keputusan menteri pendidikan dan pengajaran mengenai pengangkatan M. Hamsa.	1 lembar	Salinan	1958/04/09
284	surat- surat mengenai usul kenaikan pangkat Tariksa Kartawidjaja menjadi pegawai tinggi yang diperbantukan.	2 lembar	Tembusan	1959/03/02, 06/11
285	berkas mengenai pegawai konstituante dalam masa likuidasi	1 sampul		1959-1960
286	majalah bulana pegawai "suara serikat sekerja konstituante" no 1 dan 2 tahun I.	2 eksemplar	Stensilan	1958/03/01, 04/01
287	buletin serikat sekerja konstituante no.2 (1957), no. 2 dan 4 (1958), dan no. 5 (1959).	5 eksemplar	Stensilan	1957/06, 1958/09-10, 1959/01
288	Anggaran dasar dan mukadimah Gerakan Angkatan Muda Muslimin Indonesia, Perhimpunan Tabungan Pegawai negeri(PTPN), dan Angkatan Pembina Tani Republik Indonesia (APTRI).	6 lembar	Tembusan, dan stensilan	
289	surat-surat pernyataan mengenai agresi negara- negara asing terhadap irak dan mesir.	1 sampul	Stensilan	1956/11/04, 07/30, 1958/07/5-11
290	surat keputusan kerajaan banten de yure mengenai pelantikan anggota kabinet kerajaan banten.	2 lembar	Stensilan dan salinan	1957/11/20
291	siaran kementerian penerangan no. 6-9, 29,31,3340,41,43,50,51 tahun II	1 sampul		1905/05/10
292	surat mengenai terbentuknya organisasi pemuda non politik " pemuda perintis".	1 lembar	Stensilan	1957/04/26
293	surat dari infranteri drawijaya mengenai usul industrialisasi daerah brantas sesuai dengan rencana lima tahun pemerintah.	1 lembar	Tembusan dan stensilan	1957/06/27
294	piagam liga bhineka tunggal ika.	1 lembar	Stensilan	1957/06/27
295	surat dari konsentrasi pelajar flores mengenai pendirian biro perancang daerah	1 lembar		1957/07/27
296	resolusi dari KDP partai murba daerah jawa barat agar pemerintah menjatuhkan hukuman kepada pengarang sejarah umum anwar	1 lembar	Stensilan	1957/11/12
297	Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian P U dan Tenaga mengenai penunjukan dan pengangkatan Mentari PU dan Tenaga ad interm yaitu Ir. Pangeran noor diganti oleh Mr. R. Soekardan.	1 lembar	Tembusan	1957/12/10
298	surat kepada staf penguasa militer teriterium III mengenai pemberantasan birokrasi.	1 lembar	Stensilan	1957/12/31
299	daftar nama-nama pembesar pusat.	1 lembar	Tembusan	1905/05/11
300	Surat mengenai riwayat berdirinya Barisan Samadi Republik Indonesia (BASRI) dari Agama Jawa	1 lembar	Asli, Tembusan	sekitar 1958
301	Surat dari Raja Singamangaraja XIII dan XIV kepada Dr.Ir. H Soekarno mengenai penjelasan agama Islam	3 lembar	Lampiran, Tembusan dan stensilan	1958/01,03,05
302	surat dari menteri keuangan mengenai penghentian penyelesaian pembayaran hutang-hutang bekas negara republik indonesia serikat.	2 lembar	Stensilan	1958/01/09
303	surat-surat pernyataan mengenai pembebasan jamilah, pejuang aljazair dari hukuman mati.	3 lembar	Stensilan	1958/02/14-17, 03/07
304	resolusi dari partai murba mengenai pengkuan pemerintah yang benar atas kematian ten malaka.	1 lembar	Tembusan	1958/02/23
305	surat dari kabinet perdana menteri mengenai susunan organisasi pembukuan dan pemeriksaan kementerian keuangan.	1 lembar	Stensilan	1958/03/12
306	surat-surat pernyataan usul agar dibubarkanya saeto dan koemintang.	3 lembar	Asli dan stensilan	1958/04/10-05/23
307	surat-surat dari agama jawa asli (ADARI) kepada presiden soekarno mengenai anggapan bahwa soekarno adalah nabinya.	1 lembar	Tembusan	1958/05/02
308	surat dari GMNI mengenai susunan pengurus pleno.	1 lembar	Stensilan	1958/06/01
309	peraturan dasar gerakan pemuda republik disertai surat pengantar.	1 lembar	Asli dan stensilan	1958/07/21
310	surat-surat dari comite liga pancasila mengenai daftar nama anggota dan susunan pengurus.	2 lembar	Stensilan	1958/07/01,09/30
311	surat dari S. Purbasilo kepada presiden soekarno mengenai bubarkan partai dan hidupkan kongres rakyat seluruh indonesia.	1 lembar	Stensilan	1958/09/19
312	Pengumuman mengenai penghapusan Perwakilan Jabatan Bimbingan dan Perbaikan Sosial serta dibentuknya Perwakilan Kementerian Sosial di Bandung.	1 lembar	Stensilan	1958/10/18
313	surat edaran IPPPI mengenai ketidaksenangan dengan hasil kongres IPPPI darurat ke V.	1 lembar	Stensilan	1958/10/18
314	Surat dari Kementerian Dalam Negeri mengenai timbang terima Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.	1 lembar	Stensilan	1958/11/07
315	Sari pati ceramah Kolonel Dahlan DJamtaek mengenai Alfredo Saulo (pejuang filiplna) yang meminta perlindungan di Kedutaan besar Indonesia.	1 lembar	Stenailan	1958/11/19
316	daftar nama pegawai diplomatik/konsuler dan alamat Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	2 lembar	Stensilan	1959/01/05, 04/29
317	surat mengenai keputusan sidang pleno dewan Pimpinan organisasi serikat tani Indonesia "SAKTI".	1 lembar	Asli dan stensilan	1959/05/10

318	surat dari kementerian agama mengenai pergantian sekretaris jenderal kementerian agama.	1 lembar	Stensilan	1959/05/23
319	surat dari arsip nasional mengenai perubahan arsip negara menjadi arsip nasional.	1 lembar	Stensilan	1959/10/22
320	surat dari sarbupri mandalare agar SOBSI dan presiden membatalkan OOPt.	1 lembar	Stensilan	1960/07/15

INDEKS

- Agoes Soerja Koesoemadinata 279
- Agraria 138, 139
- Akoep Goelangge 243, 280
- Amandemen 133
- Anggaran belanja 196, 197
- Alat produksi 168
- Alat pertanian 168
- Arsip Nasional 320
- A. L. Pope 120
- Bahasa 159, 160, 180
- Bendera 53, 161, 186
- Bentuk negara 100
- Bom A dan H 112
- Buruh 169, 170
- Calon-calon Sekretaris Jenderal 193
- Cikini 124, 125
- Dasar negara 134
- Denah 228
- Dewan Banteng 118
- DI/TII 116, 117
- Ekonomi 167, 171, 172, 173
- Eksekutif 142
- Fraksi 26, 27
- Hak-hak azazi 53, 96, 97
- Ibu kota negara 163, 164
- Irian Barat 157, 158
- Islam 93, 94, 137
- Kabinet baru 101
- Kabullah Widjajaamiarsa 278
- Keadaan bahaya 143
- Kepolisian 126, 127

- Kesejahteraan 233
- Kewajiban warga negara 98
- Kualisi nasional 105
- Kunjungan 30, 31
- Lagu kebangsaan 53 162
- Laporan 73, 95, 99, 155, 175, 180, 198
- Legislatif 140
- Milisi 130
- Normalisasi keadaan 111, 114
- Olly Suriatmadja 256, 282
- Pancasila 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
- Panitia Istilah 81, 82
- Panitia Perumus 180
- Partai-partai 106, 225
- Pemerintahan 107
- Pemerintah daerah 108, 109
- Pemilihan ketua 192
- Pemilihan umum 102
- Pemuda 144
- Pendidikan 98, 131
- Peradilan 128
- Perkawinan 129, 152
- Pertahanan 110, 115
- Perumahan 230, 231, 232
- Pidato 32, 33, 34
- Piagam Bandung 154
- Piagam Jakarta 132
- Pidana 9
- Proklamasi Dua Maret 123
- PRRI 118, 119, 120, 121, 122
- Rapat 41, 42, 195
- Respublica 48
- Risalah 45, 46, 47
- Schimidt 117

- Serikat Sekerja Konstituante 286, 287
- Siaran Kementerian Penerangan 290
- Siaran kilat 49
- Soerojo 254, 255
- Statistik rapat 43, 74, 202
- Sumatera Barat 121
- Sumatera Tengah 122
- Tanah partikelir 166
- Undang-undang Dasar 135, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151
- Usep Ranawidjaja 254, 255 256, 277, 280
- Yudikatif 141
- Wajib bela umum 130
- Wilayah negara 156